

FILM DAN ISLAM
(Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Film Layar Lebar)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:
SALSABILA NIDA ZULFA SUWIGNYO
C100160288

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

FILM DAN ISLAM
(Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Film
Layar Lebar)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh :

SALSABILA NIDA ZULFA SUWIGNYO

C100160288

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Dr. Kelik Wardiono, SH., MH)

HALAMAN PENGESAHAN




FILM DAN ISLAM
(Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Film
Layar Lebar)

OLEH
SALSABILA NIDA ZULFA SUWIGNYO
C100160288

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jum'at, 21 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Dr. Kelik Wardiono, SH., MH**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Inayah SH., MH**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Dr. Rizka S.Ag., MH**
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Februari 2020

Penulis



SALSABILA NIDA ZULFA SUWIGNYO

C100160288

FILM DAN ISLAM

(Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Film Layar Lebar)

Abstrak

Film merupakan bentuk komunikasi massa elektronik berupa media audio visual yang mampu menampilkan kata – kata, bunyi, citra, dan kombinasinya. Film yang ditayangkan di layar lebar harus sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Film, Undang-Undang No. 33 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan juga Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film. Sebelum ditayangkan di layar lebar, sebuah film harus lulus sensor terlebih dahulu agar tercapai tujuan perfilman. Selanjutnya mengenai perlindungan hukum bagi penonton film mengacu pada UU Perfilman No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman pada konsideran menimbang huruf b yang berbunyi :”bahwa film sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia di dunia Internasional, sehingga film dan perfilman Indonesia perlu dikembangkan dan dilindungi”.

Kata Kunci: film, lembaga sensor film, perlindungan konsumen

Abstract

Film is a form of electronic mass communication consisting of audio-visual media that is able to display words, sounds, images, and their combinations. Films shown on the big screen must be in accordance with Law No. 33 of 2009 concerning Film, Law No. 33 of 1999 concerning Consumer Protection and Government Regulation No. 18 of 2014 concerning the Film Censorship Institution. Before showing on the big screen, a film must first pass the sensor in order to obtain film goals. Furthermore, legal permits for film viewers are discussed in Film Law No. 33 of 2009 concerning Film in the preamble considering the letter b which reads: "is a film as a mass communication media that contains the source of the intellectual life of the nation, the development of self potential, fostering noble morals, the transfer of community property, as well as a vehicle for the promotion of Indonesia in the international world, so film and Indonesian cinema needs to be developed and protected”.

Keywords: film, sensor film institutions, consumer protection

1. PENDAHULUAN

Pengaruh globalisasi serta perdagangan bebas didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak kegiatan perfilman di Indonesia, sehingga film yang beredar di masyarakat semakin bervariasi, baik itu film produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen

akan film yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih dan menikmati film sesuai keinginan konsumen. Kondisi dan fenomena di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. (Hakim, 2016)

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman menyebutkan bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukan. Menurut Effendi film merupakan media komunikasi yang bersifat audio visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul disuatu tempat tertentu. Pesan film pada komunikasi massa dapat berbentuk apa saja tergantung dari misi film tersebut. Namun demikian, umumnya sebuah film dapat mencakup berbagai pesan baik itu pesan pendidikan, hiburan dan informasi. Pesan dalam film yaitu menggunakan mekanisme lambang – lambang yang ada pada pikiran manusia berupa isi pesan, suara, perkataan, percakapan, dan sebagainya. (Psikologimania, 2013)

Dalam Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2009 menyebutkan bahwa film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, menonjolkan pornografi, memprofokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antar suku, antar ras, dan/atau antar golongan, menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai - nilai agama, mendorong khalayak umum untuk melakukan tindakan melawan hukum, dan/atau merendahkan harkat dan martabat manusia. (Undang-Undang no 33 tahun 2009, 2009)

Sensor film menurut UU No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukan kepada khalayak umum. Artinya apabila sebuah film dilakukan penyensoran berarti dilakukan penelitian, penilaian serta penentuan apakah film tersebut layak untuk dipertunjukan kepada khalayak umum. Setiap film dan iklan film yang diedarkan

dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum wajib disensor terlebih dahulu oleh Lembaga Sensor Film (LSF) untuk memperoleh surat tanda lulus sensor. Sensor dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. (Hasanah, 2016)

Mengenai perlindungan terhadap penonton film, setidaknya mengacu pada UU Perfilman No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman, pada konsideran menimbang huruf b yang berbunyi :”bahwa film sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdayaan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia di dunia Internasional, sehingga film dan perfilman Indonesia perlu dikembangkan dan dilindungi”. Menggaris bawahi pada kata film dan perfilman Indonesia perlu dilindungi, itu artinya bahwa semua yang berhubungan dengan perfilman perlu dilindungi termasuk dalam perfilman adalah penonton film. Ditambah lagi dengan sebuah prinsip pembentukan undang-undang bahwa undang-undang itu dibuat untuk melindungi warganya karena adanya sebuah kepentingan dimana manusia sebagai individu mempunyai hak asasi salah satunya yaitu hak sebagai konsumen. (Khusna, 2013)

Namun yang terjadi sekarang ini, banyak pelaku usaha perfilman yang menciptakan film tidak mengandung unsur pokok kegiatan perfilman, yaitu film yang menggambarkan adegan kekerasan, perilaku yang menjurus ke pornografi, menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai – nilai agama. Persoalan – persoalan ini yang melanggar ketentuan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Pelaku usaha dalam membuat film apabila tidak sesuai dengan pasal 6 UU No. 33 tahun 2009 tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 UU No. 33 Tahun 2009 tersebut berupa; teguran tertulis, denda administrative, penutupan sementara; dan/atau, pembubaran atau pencabutan izin. (Undang-Undang no 33 tahun 2009, 2009)

Leo Bogart menjelaskan bahwa menonton adegan kekerasan melalui film atau melalui televisicenderung merangsang jiwa anak – anak muda begitu kuat untuk bertindak agresif. Bahkan hampir semua perilaku buruk yang dilakukan orang adalah hasil dari pelajaran yang mereka terima dari media semenjak usia mereka anak –

anak. (Syah, 2013) Penonton film ada dalam posisi yang lemah jika dia sendiri tidak dijamin oleh undang-undang. Karena sejauh apapun penonton film mengeluh akan kerugian yang dia dapat saat menonton sebuah film, atau dalam proses dia mencari informasi, jika belum ada undang-undang yang memuat sebuah aturan tentang bagaimana mereka itu dilindungi dari hak-haknya tersebut maka upayanya hanya akan menjadi upaya yang sia-sia. (Khusna, 2013)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap perfilman di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud meneliti bentuk perlindungan konsumen terhadap penonton film nasional yang bergenre keislaman dengan judul **“FILM DAN ISLAM (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Film Layar Lebar)”**. Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini diantaranya yaitu tentang Bagaimana perlindungan hukum terhadap penonton film layar lebar nasional yang bernuansa keislaman.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah pendekatan normative. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan yang merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, surat kabar, artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang – undangan yang terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kategorisasi I, Tidak Mendorong Khalayak Umum Melakukan Kekerasan dan Perjudian Serta Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang nomor 33 tahun 2009 tentang film disebutkan bahwa film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Undang-Undang no 33 tahun 2009, 2009). Yang dimaksud dengan

“dilarang mengandung isi yang mendorong khalayak melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya” adalah bahwa isi film dilarang mempertontonkan perilaku yang dapat menyebabkan khalayak umum tergerak untuk meniru tindakan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. (penjelasan Undang-Undang No. 33 tahun 2009, 2009)

Dalam Film Ayat-Ayat Cinta 1 terdapat adegan kekerasan dimana Noura seorang gadis bernasib malang yang juga tetangga Fahri hidup dengan orang tua angkatnya dan kedua kakak angkatnya karena ia dipisahkan oleh orang tua kandungnya sejak ia masih bayi. Ayah angkat Noura yang bernama Bahadur merupakan sosok yang pemaarah, tidak bijaksana, kasar dan tidak pernah menghargai orang. Bahadur yang merupakan orang tua angkat Noura sering menyiksa dan menghukum Noura apabila Noura tidak menjalani perintahnya, bahkan Bahadur memperkosa Noura dan menjadikan Noura sebagai pelacur. Adegan ini merupakan adegan kekerasan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya dan adegan ini mudah ditiru oleh anak-anak akan tetapi dalam film ini tidak terdapat adegan yang dapat mendorong penonton melakukan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Film perempuan berkalung sorban juga terdapat adegan ketika Annisa kabur pada saat ia sekolah, guru Annisa kemudian melaporkan Annisa yang kabur dari kelas kepada ayahnya dan membuat ayahnya marah dan menampar serta menghukum Annisa dengan mengguyurnya di dalam kamar mandi. Dalam pernikahannya dengan Samsudin, Annisa juga tidak pernah mendapatkan hak-haknya sebagai seorang isteri, dan ia diperlakukan oleh suaminya tidak sebagaimana mestinya misalnya saat Annisa dipaksa untuk melayani suaminya padahal ia dalam keadaan haid. Annisa juga mendapatkan kekerasan fisik, dan mental oleh suaminya. Kekerasan fisik terjadi ketika Annisa tidak mau melayani Samsudin sehingga ia ditampar dan didorong dengan kasar hingga menabrak tembok hal ini ditunjukan ketika Annisa pergi ke pasar terdapat lebam di mukanya. Samsudin juga mencekik dan mengancam Annisa akan menutup pesantren milik ayahnya itu apabila ia tidak menuruti perintahnya. Kemudian kekerasan mental yang didapat Annisa ketika ia

dipoligami suaminya. Adegan ini termasuk adegan kekerasan yang dilakukan kepada seorang perempuan. Walaupun demikian dalam film ini tidak terdapat adegan yang dapat mendorong penonton melakukan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Selanjutnya dalam Film Bulan Terbelah di Langit Amerika, dalam film ini terdapat adegan kekerasan, yaitu ketika Hanum berjalan kemudian diikuti oleh Chao Wei yang hendak meminta koin yang dipegang Hanum, Chao Wei mengancam Hanum akan melukainya dengan pisau yang ada di tangannya apabila Hanum tidak memberikan koin tersebut kepada Chao Wei. Dimana dalam film ini terdapat adegan dimana Stephan yang sedang minum alkohol hingga ia mabuk dan pernyataan Stephan saat ia sedang terhimpit masalah putus cinta dengan kekasihnya, ia selalu melampiaskannya dengan minum alkohol karena menurutnya dengan seperti itu Stephan akan merasa bahagia. Adegan ini merupakan adegan yang mudah ditiru terutama oleh anak-anak dimana ketika sedang berada dalam sebuah masalah bukan dengan minum alkohol agar dapat menyelesaikan masalah dan dalam islam juga mengajarkan bahwa alkohol tidak baik untuk kesehatan tubuh bahkan alkohol bisa merusak pikiran dan tubuh manusia.

Hal itu berarti pelaku usaha dalam membuat film harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat pelaku usaha perfilman yang membuat film tidak memenuhi unsur-unsur pokok perfilman. Seperti dalam film ayat-ayat cinta 1 yang masih menampilkan kekerasan terhadap perempuan, kemudian film perempuan berkalung sorban yang juga terdapat adegan kekerasan terhadap perempuan hingga film bulan terbelah di langit Amerika yang menampilkan adegan bahwa dengan minum alkohol dapat membuat seseorang merasa bahagia. Dengan demikian maka Film Ayat-Ayat Cinta 1, Film Perempuan Berkalung Sorban dan juga Film Bulan Terbelah di Langit Amerika tidak sesuai dengan Pasal 6 huruf a Undang-Undang nomor 33 tahun 2009 tentang film dan doktrin. Oleh karena itu penonton perlu mendapatkan perlindungan hukum.

3.2 Kategorisasi II Program Tersebut Tidak Menonjolkan Pornografi

Dalam pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Film, menyebutkan bahwa film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha

perfilman dilarang mengandung isi yang menonjolkan pornografi. (Undang-Undang no 33 tahun 2009, 2009) Yang dimaksud dengan “menonjolkan pornografi” adalah bahwa isi film mempertontonkan kecabulan, atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. (Undang-Undang no 33 tahun 2009, 2009)

Dalam Film Ayat-Ayat Cinta 1, Film Perempuan Berkalung Sorban, dan Film Bulan Terbelah di Langit Amerika tidak terdapat adegan yang mempertontonkan pornografi. Hal itu berarti pelaku usaha dalam membuat film harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Pelaku usaha dalam membuat film tersebut tidak mempertontonkan adegan yang mengarah ke pornografi sehingga telah sesuai dengan norma dan doktrin. Berdasarkan uraian tersebut, maka Film Ayat-Ayat Cinta 1, Film Perempuan Berkalung Sorban, dan juga Film Bulan Terbelah di Langit Amerika, telah sesuai dengan pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Film, dan doktrin karena tidak mengandung unsur pornografi sehingga penonton tidak mendapatkan perlindungan hukum.

3.3 Kategorisasi III Tidak Memprovokasi Terjadinya Pertentangan Antarkelompok, Antarsuku, Antarras, dan/atau Antargolongan

Dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Film, menyebutkan bahwa film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan. (Undang-Undang no 33 tahun 2009, 2009) Yang dimaksud dengan “memprovokasi” adalah bahwa film berisi hasutan yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal dan pertentangan antar kelompok, antar suku, antar ras, dan/atau antar golongan. (penjelasan Undang-Undang No. 33 tahun 2009, 2009)

Dalam Film Ayat-Ayat Cinta 1, Film Perempuan Berkalung Sorban dan juga Film Bulan Terbelah di Langit Amerika tidak terdapat adegan yang dapat memprovokasi pertentangan antar kelompok, antarsuku, antar-ras dan/atau antar golongan. Film Ayat-Ayat Cinta 1, Film Perempuan Berkalung Sorban dan Film Bulan Terbelah di Langit sudah sesuai Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Film dan doktrin oleh karenanya penonton dalam hal ini tidak mendapatkan perlindungan hukum.

3.4 Kategorisasi IV Tidak Mengandung Isi yang Menistakan, Melecehkan, dan/atau Menodai Nilai-Nilai Agama

Dalam pasal 6 huruf d Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Film menyebutkan bahwa film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama. (Undang-Undang no 33 tahun 2009, 2009) Yang dimaksud dengan “menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama” adalah bahwa isi film berisi penistaan, pelecehan, penghinaan, dan penodaan ajaran agama. (penjelasan Undang-Undang No. 33 tahun 2009, 2009)

Film Ayat-Ayat Cinta 1 Ketika seorang wanita muslim yang bernama Aisha yang diperankan oleh Rianti Cartwright yang memberikan tempat duduknya kepada dua orang wanita bekebangsaan Amerika tersebut karena ia merasa iba dengan kedua wanita tersebut, datanglah seorang lelaki muslim yang memerintahkan kepada Aisha agar ia membiarkan dua wanita itu tidak mendapatkan tempat duduk di dalam kereta dan membentak Aisha karena ia tidak terima apabila Aisha memberikan tempat duduknya kepada dua orang wanita tersebut dan lelaki tersebut mengatakan bahwa dua orang wanita asal Amerika itu tidak berhak mendapatkan tempat duduk karena mereka adalah seorang kafir. Namun ketika ia diingatkan oleh Fahri bahwa ia tak semestinya berbuat seperti itu karena di dalam agama islam telah diajarkan tentang toleransi tetapi orang tersebut tidak terima dengan apa yang dilakukan Fahri dan akhirnya ia memukul Fahri hingga ujung bibir Fahri terluka.

Film Perempuan Berkalung Sorban tidak terdapat adegan yang Tidak mengandung isi yang menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama. Oleh karena itu maka, Film Ayat-Ayat Cinta 1 dan Film Bulan terbelah di Langit Amerika tidak sesuai dengan Pasal 6 huruf d Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Film sehingga penonton film perlu mendapatkan perlindungan hukum. sedangkan Film Perempuan Berkalung Sorban telah sesuai dengan Pasal 6 huruf d Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Film sehingga penonton film tidak mendapatkan perlindungan hukum.

3.5 Kategorisasi V Tidak Mendorong Khalayak Umum Melakukan Tindakan Melawan Hukum

Dalam pasal 6 huruf e Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Film menyebutkan bahwa film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum. (Undang-Undang no 33 tahun 2009, 2009) Menurut Pompe (merujuk pada putusan Hoge Raad, 31 Januari 1919), perbuatan melawan hukum adalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut, serta bertentangan dengan kesusilaan dan asas-asas pergaulan dalam masyarakat. (Prasko, 2017)

Dalam Film *Ayat-Ayat Cinta 1*, Film *Perempuan Berkalung* dan Film *Bulan Terbelah di Langit Amerika* tidak terdapat adegan yang mempertontonkan perbuatan melawan hukum. Sehingga pelaku usaha dalam hal ini telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 6 huruf e Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Film dan doktrin oleh karena itu penonton film tidak mendapatkan perlindungan hukum.

3.6 Kategorisasi VI Tidak Mengandung Isi yang Merendahkan Harkat dan Martabat Manusia

Dalam pasal 6 huruf f Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Film menyebutkan bahwa film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harkat adalah derajat (kemuliaan dan sebagainya) (KBBI, 2020), sedangkan martabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tingkat harkat manusia atau harga diri manusia. (KBBI, 2020)

Film *Ayat-Ayat Cinta 1* ini terdapat adegan yang mempertontonkan adegan yang merendahkan harkat dan martabat manusia seperti, Bahadur juga kerap merendahkan Noura terlihat dalam adegan ketika disebuah pasar, Bahadur yang menyeret tangan Noura dengan kasar kemudian Noura tersandung hingga jatuh dan Bahadur mengatakan bahwa Noura tidak becus membawa barang yang ada

ditanggannya dengan menyebut Noura sebagai pelacur. Sedangkan Film Perempuan Berkalung Sorban dan juga Film Bulan Terbelah di Langit Amerika tidak mempertontonkan adegan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Film Perempuan Berkalung Sorban, Film Bulan Terbelah di Langit Amerika telah sesuai dengan pasal 6 huruf f Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Film dan doktrin sehingga penonton film dalam hal ini tidak memperoleh perlindungan hukum. Akan tetapi dalam film ayat-ayat cinta 1 tidak sesuai dengan pasal 6 huruf f Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Film dan doktrin sehingga penonton film dalam hal ini harus memperoleh perlindungan hukum.

3.7 Kategorisasi VII Film Mengandung Cerita yang Mengandung Nilai-Nilai Pendidikan, Budi Pekerti, dan Hiburan

Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU no. 20 tahun 2005, 2005) Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, sehingga dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. (nurkholis, 2013)

Selanjutnya mengenai budi pekerti, di dalam Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan tentang Penumbuhan Budi Pekerti, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Penumbuhan Budi Pekerti yang selanjutnya disingkat PBP merupakan kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku yang positif di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa orientasi peserta didik baru untuk jenjang SMP, SMA dan SMK sampai dengan kelulusan sekolah. (PERMENDIKBUD) Menurut Haidar, Budi Pekerti adalah usaha sadar yang dilakukan untuk menanamkan ataupun menginternalisasikan nilai-nilai moral di dalam sikap maupun perilaku peserta didik supaya mempunyai sikap dan perilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari, dalam berinteraksi pada Tuhan, maupun sesama manusia dan juga interaksi dengan lingkungan atau alam. (Ruang Guru, 2018)

Film Ayat-ayat cinta 1 dan film bulan terbelah di langit Amerika memberikan nilai pendidikan, melalui film tersebut kita diajarkan bahwa pentingnya toleransi antar umat beragama, dan juga pentingnya tolong menolong sesama umat muslim tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan juga melatih untuk tetap bersabar ketika menghadapi masalah. Kemudian dalam film perempuan berkalung sorban mengajarkan kita bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang hak, perempuan tetap mempunyai hak kebebasan untuk mengenyam pendidikan tinggi, dan mendapatkan pendidikan sama dengan laki-laki, karena antara perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama di depan Tuhan. Ketiga film tersebut telah sesuai dengan norma dan doktrin sehingga penonton film tidak mendapatkan perlindungan hukum.

3.8 Kategorisasi VIII Tidak Menampilkan Kostum Wanita yang Memperlihatkan Auratnya

Dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuannya dan wanita-wanita (keluarga) orang-orang mukmin, agar mereka mengulurkan atas diri mereka (ke seluruh tubuh mereka) jilbab mereka. Hal itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal (sebagai para wanita muslimah yang terhormat dan merdeka) sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab ayat:59)

Film Ayat-Ayat Cinta 1, Film Perempuan Berkalung Sorban, Film Bulan Terbelah di Langit Amerika tidak terdapat adegan yang menampilkan kostum wanita yang memperlihatkan auratnya. Ini berarti pelaku usaha dalam membuat film telah memperhatikan norma sehingga penonton film tidak memperoleh perlindungan hukum.

3.9 Kategorisasi XI Tidak Menampilkan Adegan-Adegan yang Vulgar dan Tidak Membangkitkan Khayal dan Keinginan Rangsangan Bagi Penonton

Dalam film Islami dan bernilai dakwah, semua hal tersebut jelas tidak mungkin dibuat dan tidak boleh terlintas di benak para sineas muslim. Karena sejak awal semua tahu bahwa menampilkan adegan-adegan seperti itu meski tidak vulgar, justru memberi ruang kepada setan untuk menggoda para penonton. Minimal adegan itu

telah membangkitkan khayal dan keinginan rangsangan meski pun misalnya hanya dalam bentuk suara di balik pintu kamar. Yang jadi inti masalah bukan ada adegannya atau tidak, tapi kesan yang ditimbulkan di benak para penonton itulah yang harus dijaga. (Sarwat, 2008)

Film Ayat-Ayat Cinta 1, tidak terdapat adegan vulgar dan juga Film Bulan Terbelah di Langit Amerika, tidak terdapat adegan vulgar, sedangkan dalam Film Perempuan Berkalung Sorban terdapat adegan vulgar yaitu Pada saat Annisa, Samsudin dan Kalsum sedang berada di rumah, Kalsum meminta kepada Annisa agar Annisa menjaga anaknya dengan Samsudin yang masih bayi agar Kalsum dapat melayani Samsudin, dalam adegan ini memperlihatkan Samsudin dan Kalsum yang sedang berhubungan intim di dalam kamar dimana Samsudin yang badannya tertutup oleh kain dan berada di atas Kalsum dan dari arah luar kamar terdengar suara desahan dari Kalsum yang membuat Annisa terganggu dan tidak nyaman dengan perbuatan Samsudin dengan Kalsum.

Oleh karena itu maka Film Ayat-Ayat Cinta 1 dan Film Bulan Terbelah di Langit Amerika telah sesuai dengan norma dan doktrin sehingga penonton film tidak mendapatkan perlindungan hukum. sedangkan dalam Film Perempuan Berkalung Sorban tidak sesuai norma dan doktrin sehingga penonton film perlu mendapatkan perlindungan hukum. Analisa profile film religi dijabarkan melalui table sebagai berikut :

Tabel 1. Profile Film Religi

NO	Judul Film	Tahun Rilis	Pencantuman Khalayak Penonton	KETENTUAN ISI SIARAN									
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Ayat-ayat Cinta 1	2008	R-BO	-	V	-	-	V	-	V	V	-	-
2.	Perempuan Berkalung Sorban	2009	R-BO	-	V	-	-	-	-	-	V	-	V
3.	Bulan Terbelah di Langit Amerika	2015	R-BO	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-

Keterangan:

V : ya

- : tidak

SU : Segala Usia

R : Remaja

BO : Bimbingan Orang Tua

- A. Program tersebut dibuat dan dapat ditonton oleh penonton semua usia;
- B. Program tersebut mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- C. Program tersebut menonjolkan pornografi;
- D. Program tersebut memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar ras, dan/atau antargolongan;
- E. Program tersebut mengandung isi yang menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;
- F. Mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum;
- G. Program tersebut mengandung isi yang merendahkan harkat dan martabat manusia;
- H. Program tersebut mengandung cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, dan hiburan;
- I. Program tersebut menampilkan kostum wanita yang memperlihatkan auratnya;
- J. Program tersebut menampilkan adegan-adegan yang vulgar dan tidak membangkitkan khayal dan keinginan rangsangan bagi penonton.

4. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap penonton film layar lebar nasional yang bernuansa keislaman:

Film Ayat-Ayat Cinta 1, Film Perempuan Berkalung Sorban dan juga Film Bulan Terbelah di Langit Amerika sesuai dengan :

- a. Kategorisasi II tidak menonjolkan pornografi berdasarkan Pasal 6 huruf a Undang-Undang nomor 33 tahun 2009;
- b. Kategorisasi III tidak memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar ras, dan/atau antargolongan berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009;
- c. Kategorisasi V tidak Mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum pasal 6 huruf e Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009;

- d. Kategorisasi VII Film mengandung cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, dan hiburan;
- e. Kategorisasi VIII tidak menampilkan kostum wanita yang memperlihatkan auratnya;
- f. Hanya Film Perempuan Berkalung Sorban sesuai dengan Kategorisasi IV tidak mengandung isi yang menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama pasal 6 huruf d Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009;
- g. Film Perempuan Berkalung Sorban, Film Bulan Terbelah di Langit Amerika telah sesuai dengan Kategorisasi VI tidak mengandung isi yang merendahkan harkat dan martabat manusia dalam pasal 6 huruf f Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009;
- h. Film Ayat-Ayat Cinta 1 dan Film Bulan Terbelah di Langit Amerika telah sesuai dengan Kategorisasi XI tidak menampilkan adegan-adegan yang vulgar dan tidak membangkitkan khayal dan keinginan rangsangan bagi penonton, sehingga penonton film tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Film Ayat-Ayat Cinta 1, Film Perempuan Berkalung Sorban dan juga Film Bulan Terbelah di Langit Amerika tidak sesuai dengan :

- a. Kategorisasi 1 tidak mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya Berdasarkan Pasal 6 huruf a Undang-Undang nomor 33 tahun 2009;
- b. Film Ayat-Ayat Cinta 1 dan Film Bulan terbelah di Langit Amerika tidak sesuai kategorisasi IV tidak mengandung isi yang menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama yaitu Pasal 6 huruf d Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009;
- c. Hanya Film Ayat-Ayat Cinta 1 tidak sesuai dengan kategorisasi VI tidak mengandung isi yang merendahkan harkat dan martabat manusia pasal 6 huruf f Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009;
- d. Hanya Film Perempuan Berkalung Sorban tidak sesuai Kategorisasi XI tidak menampilkan adegan-adegan yang vulgar dan tidak membangkitkan khayal dan keinginan rangsangan bagi penonton sehingga penonton film perlu mendapatkan perlindungan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, Achmad. (2008). Peranan Lembaga Sensor Film Terhadap Perfilman Indonesia: Upaya Dakwah Melalui Sensor. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Hasanah, Sovia (2019), *Kriteria Penyensoran Film di Indonesia*. Diakses pada Selasa 15 Oktober 2019 pukul 22.30 WIB(<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57e382ada65e8/kriteria-penyensoran-film-di-indonesia/>)
- Hidayatul, Itsna Khusna. (2013). Perlindungan Terhadap Penonton Film (Analisis Isi UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. *Tesis*. Yogyakarta : UGM
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada Diakses pada Rabu 16 Oktober 2019 dari <https://kbbi.web.id>
- Kartika, Morina Santoso Hakim. (2016). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perfilman Indonesia. *Lex et Societatis*. Vol. IV No. 8 Agustus 2016
- Nurkholis. (2013). Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi. *Jurnal Kependidikan*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2013.
- Prasko. (2020). *Pengertian Melawan Hukum Menurut Ahli* diakses pada tanggal 6 Februari pukul 8.54 dari <http://prasko17.blogspot.com/2012/07/pengertian-melawan-hukum-menurut-para.html>
- Psikologimania. (2019). *Pengertian Film dan Pengaruh Film Bagi Kejiwaan*, diakses pada Selasa 15 Oktober pukul 23.00 dari <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-film-dan-pengaruh-film-bagi.html>
- Sarwat, Ahmad. (2008). “*Film Islami yang Sesuai Syariat Islam*” diakses pada tanggal 8 April 2008 pukul 22.51 dari (<http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1207627564&=film-islami-yang-sesuai-syariat-islam.htm>)
- Syah, Hakim. (2013). Dakwah Dalam Film Islam di Indonesia (antara idealism dakwah dan Komodifikasi agama). *Jurnal Dakwah*, Vol. XIV, No. 2
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 *Tentang Perfilman*
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan